



Dewan Seriusi Pembentukan Panja

USULAN pembentukan panitia kerja (panja) terkait hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) mendapat respon dari kalangan dewan.

Para wakil rakyat Jakarta ternyata mulai menyeeriusi usulan pembentukan panja. "Di tingkat fraksi sudah kami bahas soal pembentukan panja ini," ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni, kemarin.

Menurut Ghoni, semua fraksi sudah sepakat kalau usulan pembentukan panja ini terlebih dahulu dibahas dalam rapat gabungan (rapingab) dewan. "Harusan hari ini (kemarin) rapingab membahas panja ini dilakukan. Tapi ada beberapa alasan, seperti banyak dewan yang tidak bisa hadir, akhirnya rapingab (rapat pimpinan gabungan) batal digelar," beber dia.

Hanya saja, Ghoni berkeyakinan pembentukan panja untuk menelaah hasil pemeriksaan BPK bakal berjalan. "Sepertinya habis lebaran Panja terbentuk. Soalnya pembahasan ditingkat lintas fraksi sudah dikomunikasikan," terang dia.

Pembentukan panja, sambung dia, akan dibentuk dewan semata-mata bukan untuk menyalahkan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dinilai telah gagal menjalankan tugasnya.

Tetapi pembentukan panja ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dewan kepada warga Jakarta yang tidak bisa bekerja maksimal untuk memberikan sesuatu yang baik warga Jakarta. "Penyelenggara pemerintah itu, eksekutif dan legislatif, dengan adanya penilaian BPK dengan predikat WDP, ini jelas sebuah kegagalan bagi kami juga," ungkap Ghoni.

Permasalahan itu di antaranya, pengendalian dan pengamanan aset senilai Rp3,5 triliun serta pencatatannya, permasalahan piutang pajak bumi dan bangunan serta piutang pajak kendaraan bermotor yang tidak dapat ditelusuri rinciannya dan kelemahan sistem pengendalian belanja modal atas 85 paket pekerjaan pengadaan barang. (pes)